



# Oscar Primadi Jabat Inspektur Jenderal Kemenkes RI



ISTIMEWA

LANTIK - Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek melantik empat pejabat tinggi madya dan empat pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan di Ruang Leimena Kemenkes, Senin (19/2) sore.



**JAKARTA, SP** - drg Oscar Primadi MPH yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, kini dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kemenkes RI. Pelantikan jabatan dilakukan langsung Menteri Kesehatan, Prof dr Nila Farid Moeloek, Sp MK di Jakarta, Senin (19/2) siang kemarin.

Menurut Oscar, jabatan ini merupakan amanah yang tidak ringan, karena harus mengawal, mengawasi dan mendampingi terkait pembangunan kesehatan di Indonesia.

“Jadi tentunya hal-hal yang berkenaan dengan apa yang jadi predikat selama ini, bahwa Kementerian Kesehatan selama empat tahun dinilai baik bahkan mendapat predikat selalu WTP, minimal harus kita raih kembali,” katanya.

Selain itu, lanjut Oscar, dalam konteks pengawasan juga harus diubah paradigma, tidak hanya sekadar

mengaudit, tetapi upaya pendampingan penguatan terhadap satuan kerja.

“Ini memang harus dikuatkan agar tidak ada celah, pemborosan anggaran, upaya pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Sehingga upaya penguatan terhadap pendampingan itu harus jadi perhatian kita,” timpalnya.

Bekerjanya hal ini juga tidak terlepas dari memanfaatkan teknologi informasi.

“Artinya dalam konteks ini, bisa jadi alat jadi tools dalam rangka meringankan beban kerja kita karena rentang kendali Indonesia tidak ringan, dari ujung barat sampai timur. Betul-betul harus membuat kita inovasi lebih baik lagi ke depan,” ucapnya.

Sementara Nila Moeloek mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik.

“Saya ucapkan selamat. Semoga Saudara bisa bekerja lebih keras dalam mengemban amanah untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang sehat dengan pendekatan keluarga”, tutur Menkes.

Kepada Irjen yang baru dilantik, Menkes berpesan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) berperan strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Peran tersebut akan dapat dijalankan apabila Itjen sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak hanya melaksanakan fungsi audit, namun harus mampu memberikan asistensi yang memadai sebagai upaya preventif terhadap berbagai permasalahan di lingkungan Kemenkes.

“Tidak hanya mengawal opini WTP (wajar tanpa pengecualian), tetapi harus mampu meningkatkan peran Itjen sebagai pembina, katalisator dan jaminan kualitas mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan terutama pengawasan terhadap segala bentuk penyimpangan atau KKN”, ujar Menkes. **(kom-bis/bah)**